

Nomor : .....  
 Lampiran :

Kepada Yth. :  
 Deputi Bidang Pembiayaan  
 Kementerian Perumahan Rakyat  
 Jl. R. Patah I No.1  
 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Perihal : Pernyataan Telah Menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan Minat/Tidak Berminat<sup>\*)</sup> Melanjutkan Program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi TA 2011

Bersama ini kami menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)<sup>\*\*)</sup> antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup>..... Nomor..... Nomor..... tentang ..... maka BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup> ..... menyatakan bahwa:

1. Telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang belum dilakukan pembayaran subsidinya oleh Kementerian Perumahan Rakyat / masih memiliki kuota subsidi dengan jumlah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 /30 September 2009<sup>\*)</sup> dan belum dilakukan pembayaran subsidinya untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

Kelompok Sasaran	KPRS Syariah Bersubsidi		KPRS Mikro Syariah Bersubsidi	
	UNIT	Jumlah Subsidi (Rp.)	UNIT	Jumlah Subsidi (Rp.)
I				
II				
III				
Total				

2. Berminat/tidak berminat<sup>\*)</sup> untuk melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi TA 2011 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....  
 Pimpinan BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup>.....

.....  
 (Tanda tangan & nama lengkap)

Tembusan:

1. Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota/Kabupaten .....
2. Kantor Bank Indonesia Provinsi .....

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

<sup>\*\*)</sup> PKO yang berlaku pada saat penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi



## LAPORAN HASIL VERIFIKASI LPP

Nomor:

Bahwa Tim **Pelaksana** Verifikasi..... telah melakukan Verifikasi LPP pada BPRS/Koperasi Syariah<sup>o</sup> ..... dari tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... sampai dengan tanggal ..... bulan ..... Tahun .....sesuai Permenpera Nomor ..... Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

### 1. Untuk BPRS:

#### a. Profil BPRS antara lain meliputi:

- 1) Susunan pengurus;
- 2) Pemegang saham;
- 3) Permodalan;
- 4) Domisili; dan
- 5) Asset.

#### b. Photo copy KTP pengurus BPRS sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku atau hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku;

#### c. Aspek Legalitas BPRS pada saat pengajuan:

- 1) domisili BPRS;
- 2) berbadan hukum dibuktikan dengan photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
- 3) mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
- 4) mempunyai surat izin operasi syariah dari instansi yang berwenang

#### d. Aspek Keuangan BPRS pada saat pengajuan yaitu mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman untuk KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang dibutuhkan.

#### e. Surat pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan minat melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi **TA 2011** (Format A).

#### f. Telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2009

#### g. Telah ada realisasi fisik dilapangan .....%

#### h. Masih memiliki kuota subsidi

#### i. Telah menyampaikan permohonan pencairan dana subsidi

#### j. BPRS yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional sebelum tahun 2009;

#### k. Surat rekomendasi tingkat kesehatan lembaga dengan kategori sekurang-kurangnya sehat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

#### l. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan keberadaan kantor BPRS dan pemeriksaan dokumen asli yang terkait Aspek Legalitas dan Aspek Keuangan BPRS pada saat pengajuan.

### 2. Untuk Koperasi Syariah:

#### a. Profil Koperasi Syariah antara lain meliputi:

- 1) Daftar nama pendiri;
- 2) Susunan pengurus;
- 3) Permodalan;
- 4) Domisili; dan
- 5) Asset.

- b. Photo copy KTP pengurus Koperasi Syariah sesuai dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku;
- c. Aspek Legalitas Koperasi syariah pada saat pengajuan:
  - 1) domisili Koperasi Syariah;
  - 2) berbadan hukum dibuktikan dengan photo copy Akta Pendirian dan AD/ART beserta perubahannya;
  - 3) mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
  - 4) mempunyai surat izin operasi syariah dari instansi yang berwenang.
- d. Aspek Keuangan Koperasi syariah pada saat pengajuan:
  - 1) total aset pada neraca paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - 2) laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT untuk 4 (empat) tahun buku terakhir;
  - 3) kemampuan menyediakan pokok pinjaman untuk KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang dibutuhkan, dibuktikan dengan selisih Aktiva Lancar dengan Hutang Lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan atau surat dukungan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya;
  - 4) sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahun;
  - 5) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau telah memperoleh sertifikat atau pernyataan hasil penilaian kesehatan dari Dinas/Kantor Koperasi Kota/Kabupaten setempat dengan predikat Sehat;
  - 6) mempunyai rekening giro atas nama Koperasi Syariah.
- e. Surat pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan minat melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi **TA 2011** (Format A).
- f. Telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sampai dengan tanggal 30 September 2009.
- g. Telah ada realisasi fisik dilapangan ..... %.
- h. Masih memiliki kuota subsidi.
- i. Telah menyampaikan permohonan pencairan dana subsidi.
- j. Koperasi Syariah yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional sebelum tahun 2009.
- k. Surat rekomendasi tingkat kesehatan lembaga dengan kategori sekurang-kurangnya sehat yang dikeluarkan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Pemerintah Kota/Kabupaten.
- l. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan keberadaan kantor Koperasi dan pemeriksaan dokumen asli yang terkait Aspek Legalitas dan Aspek Keuangan Koperasi Syariah pada saat pengajuan.

Berdasarkan Verifikasi LPP sebagaimana tersebut di atas, disimpulkan bahwa BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup> ..... dianggap LAYAK/ TIDAK LAYAK<sup>\*)</sup> untuk meneruskan Program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

Demikian Surat Keterangan Hasil Verifikasi LPP ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi*.

.....  
Ketua Tim **Pelaksana** Verifikasi

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN  
DOKUMEN VERIFIKASI LPP**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan  
atas nama : .....  
Alamat : .....  
No. Telp/Fax : .....  
Email : .....

**MENYATAKAN**

1. Bahwa segala dokumen yang telah kami berikan kepada Tim Verifikasi ..... adalah benar dan sah.
2. Semua informasi tertulis dan bukti penunjang yang ditunjukkan menggambarkan situasi dan fakta yang sesungguhnya dan telah dinyatakan benar adanya.
3. Bahwa Tim Verifikasi hanya bertanggungjawab sebatas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup> ..... .
4. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar/palsu maka kami bersedia dicabut keikutsertaannya sebagai Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP) Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi LPP ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta penuh rasa tanggung jawab.

.....,

Pimpinan BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup>.....

Materai  
Rp 6.000,-

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

<sup>\*)</sup>Coret yang tidak perlu

**note: yang bertandatangan harus sesuai dengan AD LPP atau surat keterangan kepengurusan yang sah, bahwa nama tersebut merupakan orang yang berwenang untuk bertindak mewakili LPP tersebut.**

## SURAT PERNYATAAN TELAH DIVERIFIKASI LPP

Pada hari ini .... tanggal ....., saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat Kantor :

Bersama ini saya menyatakan bahwa terhadap instansi tersebut diatas telah dilakukan Verifikasi LPP oleh Tim **Pelaksana** Verifikasi mulai tanggal .... selesai tanggal ..... sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Keterangan Hasil Verifikasi LPP (Format B) tanggal .... nomor .....
2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi LPP (Format C) tanggal .....

Demikian Surat Pernyataan Telah Diverifikasi LPP ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan ***dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.***

.....  
Ketua Tim Pelaksana Verifikasi  
.....

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

Daftar Nasabah Calon Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011

BPR/koperasi \*) :

Bulan Transaksi :

No	Kota/ Kabupaten	Lokasi/ Alamat Rumah	Data Nasabah					Akad Pembiayaan		Infomasi Pembiayaan				Subsidi			Data Rumah			
			Nama Nasabah	Nomor KTP	Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan	Nomor Akad	Tanggal Akad	RAB Rumah (Rp)	Dana Tabungan/S wadaya (Rp)	Nilai Pembiayaan	Tenor (Th)	Skim	Tahun/ Tahap	Jumlah (Rp)	Jenis Rumah	Tipe Rumah	Luas (m2)	
																			Bng	Tanah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total																				

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor urut Nasabah
- Kolom 2 : Nama Kota/Kabupaten dari lokasi rumah
- Kolom 3 : Lokasi rumah (ditulis lengkap)
- Kolom 4 : Nama Nasabah
- Kolom 5 : Nomor KTP Nasabah
- Kolom 6 : Nama ibu kandung Nasabah
- Kolom 7 : Pekerjaan Nasabah 4 pilihan (TNI/Polri; PNS; Swasta;Wiraswasta)
- Kolom 8 : Penghasilan Nasabah
- Kolom 9 : Nomor Akad Pembiayaan dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LPK
- Kolom 10 : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit
- Kolom 11 : RAB pembangunan/perbaikan
- Kolom 12 : Tabungan/Dana Swadaya Nasabah
- Kolom 13 : Nilai KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diberikan kepada Nasabah
- Kolom 14 : Waktu kredit (tenor) yang digunakan dalam perjanjian kredit (tahun)
- Kolom 15 : Skim Subsidi diisi angka 1/2/3/4 (1.IO-BP & selisih bunga, 2. selisih bunga, 3 uang muka, 4 membangun/memperbaiki rumah)
- Kolom 16 : Tahap KPRS Mikro Bersubsidi (1 unt 4 th; 2 unt 3 th; 3 unt 2 th;4 unt 1 th; 5 unt 6 bl)
- Kolom 17 : Besarnya dana subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah
- Kolom 18 : Jenis rumah, diisi RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T=Rumah 1/2 Tembok, RKP=Rumah Kayu Panggung, RKBP = Rumah Kayu Bukan Panggung)
- Kolom 19 : Tipe Rumah diisi RIT-1, RIT2,RS-1, RS-2
- Kolom 20 : Luas bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki
- Kolom 21 : Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki
- \*) : Pilih salah satu

.....  
Pemimpin BPRS/Koperasi Syariah\*)  
.....

(.....)

Daftar nasabah calon penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang lolos Verifikasi Administrasi TA 2011

BPRS/Koperasi Syariah \*) :  
Bulan Transaksi :

**Format F**

No	Kota/ Kabupaten	Lokasi/ Alamat Rumah	Data Nasabah					Perjanjian Akad		Informasi pembiayaan				Subsidi			Data Rumah			
			Nama Nasabah	Nomor KTP	Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan	Nomor Akad	Tanggal Akad	RAB Rumah (Rp)	Dana Tabungan/S wadaya (Rp)	Nilai Pembiayaan	Tenor (Th)	Skim	Tahun/ Tahap	Jumlah (Rp)	Jenis Rumah	Tipe Rumah	Luas (m2)	
																			Bng	Tanah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total																				

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor urut nasabah  
Kolom 2 : Nama Kota/Kabupaten dari lokasi rumah  
Kolom 3 : Lokasi rumah (ditulis lengkap)  
Kolom 4 : Nama nasabah pengambil kredit  
Kolom 5 : Nomor KTP Nasabah  
Kolom 6 : Nama ibu kandung nasabah  
Kolom 7 : Pekerjaan nasabah 4 pilihan (TNI/Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta)  
Kolom 8 : Penghasilan nasabah  
Kolom 9 : Nomor akad dari akad pembiayaan yang dilakukan dengan LPP  
Kolom 10 : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam akad pembiayaan  
Kolom 11 : RAB pembangunan/perbaikan  
Kolom 12 : Tabungan/Dana Swadaya nasabah  
Kolom 13 : Nilai KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diberikan kepada nasabah  
Kolom 14 : Tenor akad pembiayaan  
Kolom 15 : Skim Subsidi diisi angka 1/2/3/4 (1.IO-BP & selisih bunga, 2. selisih bunga, 3 uang muka, 4 membangun/memperbaiki rumah)  
Kolom 16 : Tahap KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (1 unt 4 th; 2 unt 3 th; 3 unt 2 th; 4 unt 1 th; 5 unt 6 bl)  
Kolom 17 : Besarnya dana subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah  
Kolom 18 : Jenis rumah, diisi RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T=Rumah 1/2 Tembok, RKP=Rumah Kayu Panggung, RKBP = Rumah Kayu Bukan Panggung)  
Kolom 19 : Tipe Rumah diisi RIT-1, RIT2,RS-1, RS-2  
Kolom 20 : Luas bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki  
Kolom 21 : Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki  
\*) : Pilih salah satu

.....  
Ketua Tim Pelaksana Verifikasi  
.....

(.....)

Kop Surat BPRS/ Koperasi Syariah

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN  
DOKUMEN NASABAH DAN REALISASI FISIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Status Perkawinan : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telepon : .....

**MENYATAKAN**

1. Bahwa segala dokumen dan surat pernyataan yang telah kami berikan kepada BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup> ..... dan Tim Pelaksana Verifikasi ..... adalah benar dan sah.
2. Bahwa telah melakukan realisasi fisik sekurang-kurangnya 30% dari Rencana Pembangunan/Perbaikan Rumah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar/palsu dan realisasi fisik kurang dari 30% maka kami bersedia dicabut keikutsertaannya sebagai nasabah penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta penuh rasa tanggung jawab.

.....  
 Nama Nasabah .....

Materai  
Rp 6.000,-

.....  
 (Tanda tangan & nama lengkap)

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu





**SURAT PERNYATAAN TELAH  
DIVERIFIKASI NASABAH**

Nomor:

Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh ..... Nomor ..... tanggal ....., pada hari ini ....., tanggal ....., saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat Kantor :

Menyatakan telah diverifikasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tim **Pelaksana** Verifikasi telah melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen akad pembiayaan sesuai Daftar Nasabah Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diajukan oleh Pihak BPRS/Koperasi Syariah. Pelaksanaan verifikasi dimulai pada tanggal ..... dan selesai pada tanggal .....
2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim **Pelaksana** Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.)	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan/ Subsidi (Rp)	Subsidi Maksimum per Rumah
I	42.000.000			5.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
II	42.000.000			7.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
III	42.000.000			9.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
Total I				

3. Sebagai kelengkapan Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah, dilampirkan:
  - a. Laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh..... Nomor.....Tanggal.....
  - b. Daftar Nasabah Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang Lolos Verifikasi Administrasi, Wawancara dan Pengecekan Lapangan TA 2011 (Format I).
4. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim **Pelaksana** Verifikasi tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.

Demikian Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi*.

.....  
Ketua Tim Pelaksana Verifikasi  
.....

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

\*)Coret yang tidak perlu

Daftar nasabah calon penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang lolos Verifikasi Administrasi, Wawancara dan Pengecekan Lapangan TA 2011

BPR/koperasi \*) :

Bulan Transaksi :

No	Kota/ Kabupaten	Lokasi/ Alamat Rumah	Data Nasabah					Perjanjian Akad		Infomasi pembiayaan				Subsidi			Data Rumah				No. SKHVD
			Nama Nasabah	Nomor KTP	Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan	Nomor Akad	Tanggal Akad	RAB Rumah (Rp)	Dana Tabungan/S wadaya (Rp)	Nilai Pembiayaan	Tenor (Th)	Skim	Tahun/ Tahap	Jumlah (Rp)	Jenis Rumah	Tipe Rumah	Luas (m2)		
																			Bng	Tanah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Total																					

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor urut nasabah  
 Kolom 2 : Nama Kota/Kabupaten dari lokasi rumah  
 Kolom 3 : Lokasi rumah (ditulis lengkap)  
 Kolom 4 : Nama nasabah pengambil kredit  
 Kolom 5 : Nomor KTP Nasabah  
 Kolom 6 : Nama ibu kandung nasabah  
 Kolom 7 : Pekerjaan nasabah 4 pilihan (TNI/Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta)  
 Kolom 8 : Penghasilan nasabah  
 Kolom 9 : Nomor akad dari akad pembiayaan yang dilakukan dengan LPP  
 Kolom 10 : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam akad pembiayaan  
 Kolom 11 : RAB pembangunan/perbaikan  
 Kolom 12 : Tabungan/Dana Swadaya nasabah  
 Kolom 13 : Nilai KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diberikan kepada nasabah  
 Kolom 14 : Tenor akad pembiayaan  
 Kolom 15 : Skim Subsidi diisi angka 1/2/3/4 (1.IO-BP & selisih bunga, 2. selisih bunga, 3 uang muka, 4 membangun/memperbaiki rumah)  
 Kolom 16 : Tahap KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (1 unt 4 th; 2 unt 3 th; 3 unt 2 th; 4 unt 1 th; 5 unt 6 bl)  
 Kolom 17 : Besarnya dana subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah  
 Kolom 18 : Jenis rumah, diisi RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T=Rumah 1/2 Tembok, RKP=Rumah Kayu Panggung, RKBP = Rumah Kayu Bukan Panggung)  
 Kolom 19 : Tipe Rumah diisi RIT-1, RIT2, RsS-1, RsS-2  
 Kolom 20 : Luas bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki  
 Kolom 21 : Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki  
 Kolom 22 : Nomor surat keterangan hasil verifikasi nasabah  
 \*) : Pilih salah satu

.....  
Ketua Tim Pelaksana Verifikasi  
.....

(.....)

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SUBSIDI  
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH MELALUI KPRS/KPRS MIKRO  
SYARIAH BERSUBSIDI**

Pada hari ini ....., tanggal ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
- Alamat LPK : .....

selanjutnya disebut LPP,

2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- .....

selanjutnya disebut nasabah,

menyatakan bahwa:

1. LPP bertanggungjawab menyalurkan dana subsidi Perumahan sejumlah Rp ..... ( .....) kepada Nasabah.
2. Nasabah bertanggungjawab menggunakan dana subsidi Perumahan sejumlah Rp ..... ( .....) akan digunakan untuk pembangunan/perbaikan\*) rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
3. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana subsidi perumahan pada angka 1 dan 2 di atas, LPP dan nasabah bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi*.

LPP

.....

Nasabah

.....

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

\*)Coret yang tidak perlu

Nomor : .....  
 Lampiran :

Kepada Yth:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
 Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat  
 Kementerian Perumahan Rakyat  
 Jl. R Patah I No. 1 Kebayoran Baru  
 Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun 2011

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah Nomor ..... tanggal ..... , maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi	
	(unit)	Dana Subsidi (Rp)
I		
II		
III		
Total		

2. Penerima dana:

- Nama BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup> : .....
- Nama Bank : .....
- Nama rekening : .....
- Nomor rekening : .....
- NPWP : .....

3. Lampiran terdiri dari;

- Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Verifikasi (Format H)
- Laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh ..... Nomor ..... tanggal.....;
- Kuitansi pembayaran (Format L);
- Faktur pajak dan SSP (bila ada);
- Daftar nasabah penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang lolos Verifikasi administrasi, wawancara dan pengecekan lapangan TA 2011 (Format I);
- Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (Format J);
- Jaminan Subsidi Perumahan (Format M) sebesar 5% dari nilai subsidi yang akan diterima LPP atas pelaksanaan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan asuransi atau Perusahaan Penjaminan; dan
- Jaminan Perseorangan (Personal guarantee) menggunakan Format N dari LPP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pimpinan BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup>.....

.....  
 (Tanda tangan & nama lengkap)

Tembusan

1. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat

Nomor : (01) .....		KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN	
Sudah Terima Uang Dari :		Direktorat Jenderal Perbendaharaan Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat	
Jumlah Uang	: (02) .....		
Terbilang	: (03) .....		
Untuk Pembayaran	: (04)	Pembayaran Subsidi Kredit Perumahan (KPR-RSH) Tahun ..... berdasarkan <b>Surat Pernyataan Telah Diverifikasi</b> <b>Nasabah</b> Nomor : .....	
Menyetujui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen  .....09)		(05)....., Tanggal (06)..... <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai Rp. 6.000,-</div> ..... .....	
Nama Lengkap NIP : .....		Nama Lengkap	

## PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI

NOMOR	URAIAN ISIAN
01	Diisi nomor kuitansi/ bukti pembayaran
02	Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka (Rp/ Valas)
03	Diisi jumlah atau nilai uang dengan huruf
04	Diisi uraian pembayaran
05	Diisi tempat kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
06	Diisi tanggal kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
07	Diisi nama jabatan penerima pembayaran
08	Diisi tanda tangan penerima pembayaran dan dibubuhi stempel unit organisasi penerima pembayaran
09	Diisi tanda tangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi stempel satuan kerja

**(Kop Asuransi/Perusahaan Penjaminan Penerbit Jaminan)**

## **SURAT JAMINAN SUBSIDI PERUMAHAN**

Nomor Jaminan : \_\_\_\_\_

Nilai Rp \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ [nama dan alamat penyedia] sebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan (LPKP) \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan \_\_\_\_\_ [nama dan alamat perusahaan penjaminan] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada \_\_\_\_\_ [nama dan alamat PPK] sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) yang harus dibayarkan kepada PENERIMA JAMINAN.
2. Bahwa kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar.
3. Bahwa TERJAMIN dengan suatu perjanjian tertulis No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan PENERIMA JAMINAN untuk melaksanakan penyaluran Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai subsidi yang telah disetujui sebesar Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) dan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
4. Bahwa untuk Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tersebut diatas, PENJAMIN setuju membayar kepada PENERIMA JAMINAN, 5% (lima persen) dari jumlah subsidi yang akan disalurkan sebesar Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) sebagai jaminan subsidi perumahan sebelum pelaksanaan penyaluran berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
5. Jika TERJAMIN telah menyalurkan subsidi sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dan dinyatakan tidak ada temuan oleh tim audit maka PENERIMA JAMINAN wajib mengembalikan uang jaminan tersebut sejumlah 5% (lima persen) dari jumlah subsidi;
6. Jika TERJAMIN tidak menyalurkan subsidi sesuai PKO dan terdapat temuan tim audit maka surat jaminan ini dicairkan jika tidak maka Surat Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ (selama berlakunya kontrak atau sampai pada tanggal yang telah ditetapkan)
7. Tuntutan pencairan atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh PENERIMA JAMINAN secara tertulis kepada PENJAMIN segera setelah TERJAMIN cidera janji (Wanprestasi/*default*) karena tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak menyalurkan dana subsidi perumahan sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
8. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari PENERIMA JAMINAN.

9. Dengan menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
10. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari **kerja** sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
Pada Tanggal \_\_\_\_\_

TERJAMIN	PENJAMIN
(_____) Nama Jelas	(_____) Nama Jelas

Imbal Jasa Penjamin IDR \_\_\_\_\_  
Terbilang \_\_\_\_\_

*Untuk keyakinan, Penerima  
Jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi Jaminan ini  
ke \_\_\_\_\_[Penerbit jaminan]*

## JAMINAN PERSEORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BPRS/Koperasi Syariah (LPP) \_\_\_\_\_, badan hukum berkedudukan di \_\_\_\_\_, dalam hal ini diwakili Direktur/Direksi/Ketua/Manajer \_\_\_\_\_ selaku pemegang saham pengendali/direksi/manajer LPP ..... selanjutnya disebut PENJAMIN.
2. Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, dalam hal ini diwakili oleh Andri Yusandra, ST. MUM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ antara LPP \_\_\_\_\_ dan **Deputy Bidang Pembiayaan** Kementerian Perumahan Rakyat \_\_\_\_\_.

PENJAMIN menerangkan bahwa untuk menjamin terlaksananya penyaluran subsidi tepat sasaran dan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ beserta perubahannya, maka PENJAMIN dengan ini menjamin dan berjanji serta mengikatkan diri terhadap Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat berkedudukan di di Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama LPP \_\_\_\_\_ kepada PENERIMA JAMINAN serta bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya penyaluran subsidi sesuai dengan pernyataan kelayakan nasabah sebanyak \_\_\_\_\_ nasabah, berdasarkan hasil Verifikasi Nasabah oleh Tim Verifikasi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional beserta perubahannya.

PENJAMIN selanjutnya dengan tegas menyatakan:

1. Jaminan ini diberikan oleh PENJAMIN kepada dan untuk kepentingan PENERIMA JAMINAN dengan melepaskan segala hak-hak utama (*privileges*) yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang PENJAMIN, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) hak-hak utama yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 1831, 1837, 1838, 1843, 1847, 1849 dan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mengakui Jaminan ini sebagai bukti yang sah dan akan menerima baik, semua data-data yang terdapat dalam Laporan Verifikasi LPP dan Laporan Verifikasi Nasabah baik mengenai jenis maupun jumlah yang bersangkutan, dengan apa yang telah disalurkan oleh LPP.
3. Membayar jumlah yang termasuk di sub 2 tersebut di atas dan mengakuinya sebagai penyimpangan penyaluran subsidi tanpa atau harus diperlukan suatu teguran atau pernyataan lalai terlebih dahulu, jika PENERIMA JAMINAN memberitahukan bahwa LPP \_\_\_\_\_ tidak memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional dan ketentuan



peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kprs/Kprs Mikro Syariah Bersubsidi terhadap YANG DIJAMIN yaitu Kementerian Perumahan Rakyat.

4. PENJAMIN juga melepaskan haknya untuk meminta kepada Lembaga/Badan Negara yang berhak guna meng-eksekusi barang-barang jaminan lainnya terlebih dahulu sebelum kewajiban-kewajibannya berdasarkan penjaminan ini dilaksanakan.
5. Jika LPP \_\_\_\_\_ tidak menyalurkan dana subsidi kepada nasabah penerima subsidi sesuai hasil Verifikasi Nasabah oleh Tim Audit yang sesuai dengan Permen Perubahan \_\_\_\_\_ tahun 2011, maka LPP secara otomatis memberi kuasa, yang tidak akan berakhir karena alasan apa pun juga, dan dengan hak substitusi kepada PENJAMIN untuk menyetorkan ke kas Umum Negara atau yang sesuai dengan rekomendasi Laporan Hasil Audit Tim Audit pelaksanaan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi atau menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
6. Penjaminan ini diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN terhitung mulai tanggal penandatanganan pemberian Jaminan ini dan berlaku terus sampai ada pemberitahuan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN.
7. Khusus dalam hal kepailitan atau dalam hal pembekuan, atas PENJAMIN \_\_\_\_\_, baik sewaktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia, PENERIMA JAMINAN tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari LPP untuk mengadakan persetujuan atas penyelesaian. Dalam hal ini PENERIMA JAMINAN masih tetap mempunyai hak tagih terhadap LPP \_\_\_\_\_ dan PENJAMIN untuk jumlah seluruhnya sesuai rekomendasi Laporan Hasil Audit oleh Tim Audit pelaksanaan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

PENJAMIN telah mengetahui dan dengan ini menyetujui segala ketentuan-ketentuan dari syarat-syarat yang termaktub dalam Perjanjian Perorangan tersebut di atas. PENJAMIN menyetujui untuk melaksanakan dan memenuhi segala ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Pemberian Jaminan ini.

Mengenai segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini, kedua belah pihak memilih domisili hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_

PENJAMIN

PENERIMA JAMINAN

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA  
TENTANG  
PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA SUBSIDI  
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH MELALUI KPRS/KPRS MIKRO  
SYARIAH BERSUBSIDI**

Pada hari ini ....., tanggal ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
- Alamat LPP : .....

selanjutnya disebut LPP,

2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- .....

selanjutnya disebut nasabah,

menyatakan bahwa:

1. LPP telah menyalurkan dana subsidi Perumahan kepada nasabah sejumlah Rp ..... ( .....) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah telah menerima dan memanfaatkan dana subsidi Perumahan sejumlah Rp ..... ( .....) secara utuh untuk pembangunan/perbaikan\*) rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
3. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran, penerimaan dan pemanfaatan dana subsidi perumahan pada angka 1 dan 2 di atas, LPP dan nasabah bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Bersama Tentang Penerimaan dan Pemanfaatan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi*.

LPP

.....

Nasabah

.....

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

\*)Coret yang tidak perlu

